



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Normalisasi Ciliwung Kembali mandek

Pembebasan 118 bidang tanah dibatalkan karena APBD DKI defisit.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA — Ciliwung masih harus bersabar. Normalisasi sungai yang membelah Jakarta itu terancam mandek. Sebab, pemerintah DKI belum menuntaskan pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk kelanjutan proyek yang dimulai sejak 2013 itu.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), Bambang Hidayah, mengatakan kegagalan pembebasan lahan bukan berarti normalisasi batal total, melainkan hanya akan mundur dari target pada 2021.

Seandainya lahan tersedia tahun depan pun, dia melanjutkan, pekerjaan belum bisa berlangsung pada 2021. Sebab, ada pengalihan aset dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI yang memakan waktu. Biasanya, normalisasi baru bisa dikerjakan berselang dua tahun setelah lahan dibebaskan. "Kami olah dulu, kami cek juga asetnya. Tidak akan terkejar di 2021," ujar Bambang, kemarin.

Normalisasi Kali Ciliwung merupakan pembuatan dinding turap beton atau *sheetpile* yang bertujuan mengembalikan lebar alamiah sungai itu, yaitu 35-50 meter. Menjadi bagian dari program penanggulangan banjir Jakarta, pelebaran itu diharapkan meningkatkan daya tampungnya dari 200 jadi 570 meter kubik per detik.

Balai Besar dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbagi tugas merestorasi sungai yang di bawah

wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini. Pemprov DKI Jakarta membebaskan lahan untuk pementasan oleh Balai Besar. Sebanyak 118 bidang tanah itu tersebar di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang. Dengan anggaran Rp 160 miliar, eksekusi dijadwalkan berlangsung tahun depan. Namun, rencana tinggal rencana. Pembebasan lahan dibatalkan karena DKI defisit anggaran. Ada pendapatan yang belum disetorkan, yaitu dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun.

Ketua Komisi Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menilai pemerintah Jakarta tidak menempatkan program penanggulangan banjir sebagai prioritas. Menurut dia, hal itu terlihat dari usulan anggaran yang lebih kecil dibanding program lain yang tidak mendesak. Misalnya, pembangunan trotoar yang mencapai Rp 1,2 triliun, sedangkan total kebutuhan pengentasan banjir Rp 1 triliun.

Di luar soal anggaran, Ida mengatakan program ini juga kerap mandek akibat hambatan lain, termasuk perdebatan konsep. Tahun lalu, Gubernur Anies Baswedan menginginkan Ciliwung dibenahi lewat naturalisasi. Tidak dengan menanam beton, melainkan memasang batu kali di bantaran sungai. "Saya enggak tahu Pak Gubernur programnya apa. Kok, justru program prioritas dia trotoar, bukan penanggulangan banjir,"

ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, meyakini pembatalan pembebasan lahan itu tidak akan banyak mengganggu program pengendalian banjir secara keseluruhan. "Ciliwung sudah ada sungainya. Cuma nanti akan dipasang *sheetpile* supaya air tidak meluap. Jadi, dampaknya tidak akan terlalu signifikan," kata dia.

Menurut Juaini, Jakarta siap menghadapi musim hujan yang sudah di depan mata. Modalnya adalah pengerukan sungai dan waduk di musim kemarau lalu. Dinas Sumber Daya Air juga telah menggali ratusan sumur resapan baru dan menyiagakan satuan tugas pengendali banjir.

Rencana pembelian 118 bidang tanah itu telah diajukan oleh pemerintah DKI kembali dalam APBD 2020. "Ada anggaran Rp 600 miliar untuk pembebasan lahan, termasuk yang batal tahun ini," katanya. ●